



**KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025
PADA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian target kinerja reformasi birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sesuai dengan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 untuk area perubahan Deregulasi Kebijakan, perlu diselenggarakan penilaian Indeks Reformasi Hukum tahun 2025 pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
b. bahwa guna pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum tahun 2025 pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim penilai mandiri;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 272);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025 PADA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Tim Penilai Mandiri dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penilai Mandiri dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.
- KETIGA : Tim Penilai Mandiri bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2025

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFIANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI
HUKUM TAHUN 2025 PADA BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA

SUSUNAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025
PADA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
A. TIM ASESOR				
1.	Edi Subowo	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Ketua	<ul style="list-style-type: none">a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) tahun 2025 pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; danb. Melaporkan hasil penilaian mandiri IRH tahun 2025 pada BPIP kepada Sekretaris Utama BPIP
2.	Fuad Himawan	Direktur Advokasi	Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. Melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri IRH tahun 2025 pada BPIP di Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; danb. Melaporkan hasil verifikasi penilaian mandiri IRH tahun 2025 pada BPIP di Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.
3.	Tri Purno Utomo	Kepala Biro Pengawasan Internal		
4.	Dodi Setiawan	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana		
5.	Ibnu Triwijaya	Analisis Hukum Ahli Madya		

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
B. TIM KERJA				
1.	Berthine S. Soediono	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung IRH tahun 2025 pada BPIP sesuai dengan variabel penilaian IRH.
2.	Siti Maimunah	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Menginventarisasi data dukung IRH tahun 2025 pada BPIP sesuai dengan variabel penilaian IRH Tahun 2025; b. Mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan c. Melaporkan hasil inventaris dan pengunggahan data dukung IRH tahun 2025 pada BPIP kepada Ketua.
3.	Rachmawati Oktiviani	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya		
4.	Jackson Simamora	Analisis Hukum Ahli Madya		
5.	Janri Alin Tomson	Analisis Hukum Ahli Madya		
6.	Muhammad Aliyuddin	Kepala Subbagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi		
7.	Fitriya Wulansari	Kepala Subbagian Organisasi		
8.	Ardhan Irfan	Kepala Subbagian Fasilitasi Dewan Pengarah dan Kepala		
9.	Annisa Nur Dzakiyyah	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama		
10.	Hermanu Prabowo	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum dan Organisasi		
11.	Franko Jhoner	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda		
12.	Widya C. Budi Dharmo	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda		
13.	Basuki Katono	Analisis Hukum Ahli Muda		
14.	Adi Setiawan	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama		
15.	Amadio Tondi M.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama		
16.	Hafidz Putra Arifin	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama		

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
17.	Rizky Kurniyanto Widyasasmito	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama		
18.	Wan Akhmad Triadi Djaya	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama		
19.	Zainul Amal Muhammad	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama		
20.	Samrin	Analis Hukum Ahli Pertama		
21.	Sahroni L. Rajagukguk	Penelaah Teknis Kebijakan		
22.	Erlangga A. Saputra	Penelaah Teknis Kebijakan		
23.	Sonia Alfiyana	Penelaah Teknis Kebijakan		
24.	Juanda Tampubolon	Penelaah Teknis Kebijakan		
25.	Philipus Jans Martuah	Penata Pengelola Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan		

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFIANTO